



PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN 2025

**PENGUATAN SEKTOR JASA KEUANGAN YANG STABIL DAN INKLUSIF
UNTUK Mendukung PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**



PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN (PTIJK) 2025

Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional Jakarta, 11 Februari 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
semua

Om swastyastu, Namo buddhaya, Salam
Kebajikan

A. PEMBUKAAN

1. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya, kita dapat bertemu dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025.
2. Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu para undangan yang kami hormati pada pertemuan tahun ini yang mengusung tema **“Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional”**.
3. Pertemuan ini merupakan laporan akuntabilitas menyeluruh kami kepada industri sektor jasa keuangan dan para pemangku kepentingan. Pertemuan ini juga merupakan puncak dari dialog komprehensif akhir tahun OJK yang telah diselenggarakan dengan pimpinan asosiasi dan industri di masing-masing sektor.

B. KONDISI PEREKONOMIAN & SEKTOR JASA KEUANGAN (SJK) INDONESIA

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

4. Kita patut bersyukur dapat menjalani tahun 2024 dengan baik dengan berbagai dinamikanya. Tahun lalu kita dihadapkan pada beberapa isu sentral seperti tingginya tensi geopolitik, divergensi pemulihan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global, serta pelaksanaan pemilihan umum di berbagai negara besar termasuk Indonesia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Good morning and best wishes to all of us

Om swastyastu, Namo buddhaya, Salam
Kebajikan

A. OPENING

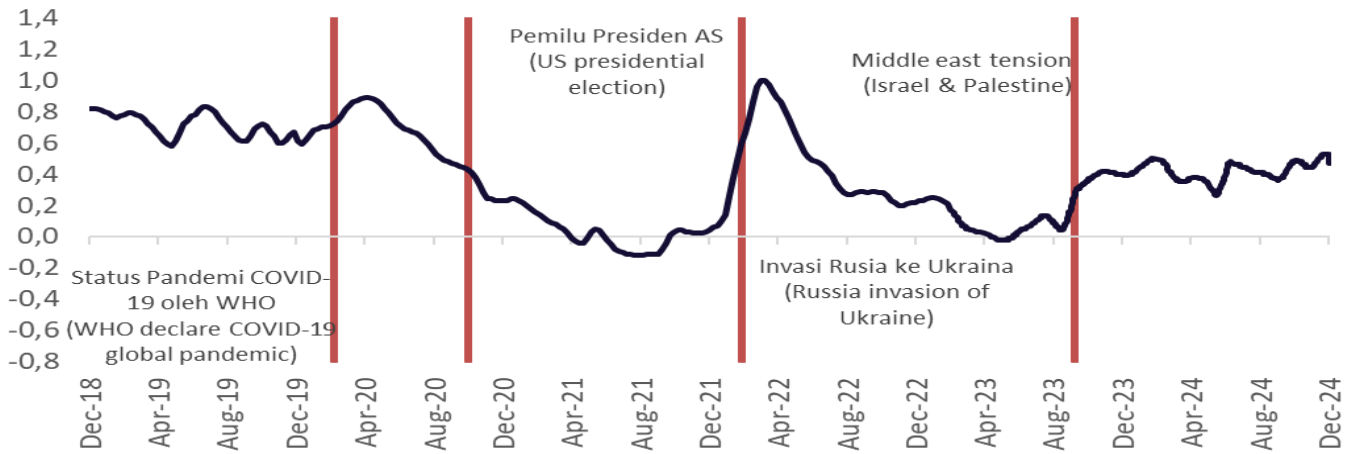
1. Praise and gratitude to God Almighty for the blessings bestowed upon us with the opportunity to gather here at the 2025 Annual Financial Services Industry Meeting.
2. We sincerely thank all distinguished guests for attending this year's occasion, themed: **“Strengthening a Stable and Inclusive Financial Services Sector to Support National Priority Programs”**.
3. This occasion is our comprehensive accountability report to the financial services industry and other stakeholders. This occasion also represents a follow-up to the expectations conveyed by stakeholders during OJK's year-end dialogues with each sector.

B. ECONOMIC CONDITION & INDONESIA FINANCIAL SERVICES SECTOR

Notable Ladies and Gentlemen,

4. Let us be grateful that Indonesia has successfully navigated 2024 despite numerous dynamics. Last year, we encountered central issues such as heightened geopolitical tensions, economic recovery divergence and global trade fragmentation, and elections in various large countries including Indonesia.

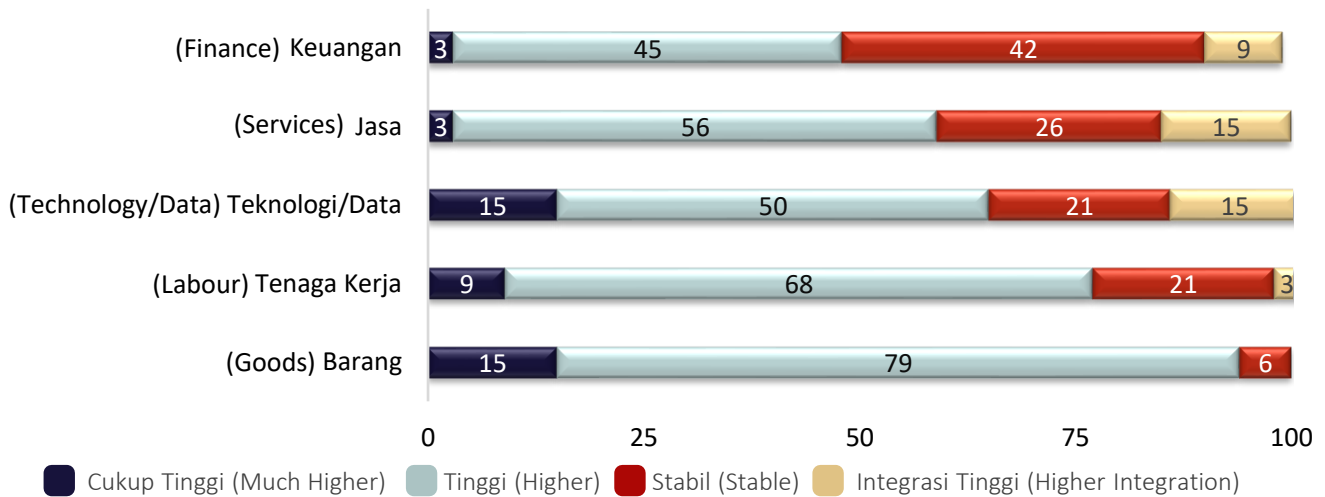
Grafik 1 . BlackRock Geopolitical Risk Index¹
Graph 1 . BlackRock Geopolitical Risk Index¹



¹ diukur dari frekuensi laporan dan berita terkait kejadian geopolitik tertentu. Angka merupakan nilai standar deviasi terhadap pergerakan 5 tahun ke belakang.
¹(measured by the frequency of reports and news related to certain geopolitical events. The figure is the standard deviation value of the movement over the past five years).

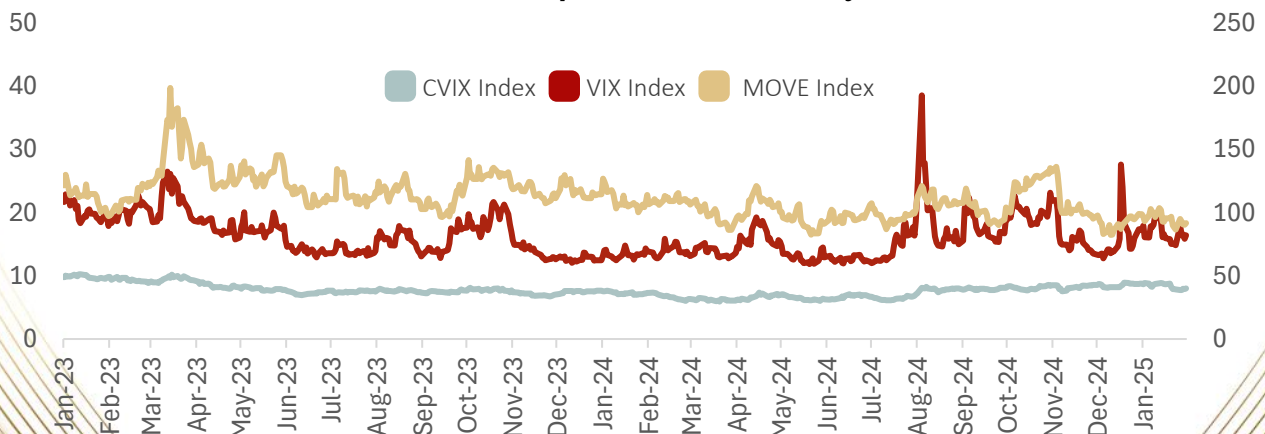
Sumber (Source): Bloomberg

Grafik 2. Fragmentasi Perdagangan
Graph 2. Trade Fragmentation



Sumber (Source): Chief Economists Outlook January 2025

Grafik 3. Volatilitas Pasar
Graph 3. Market Volatility

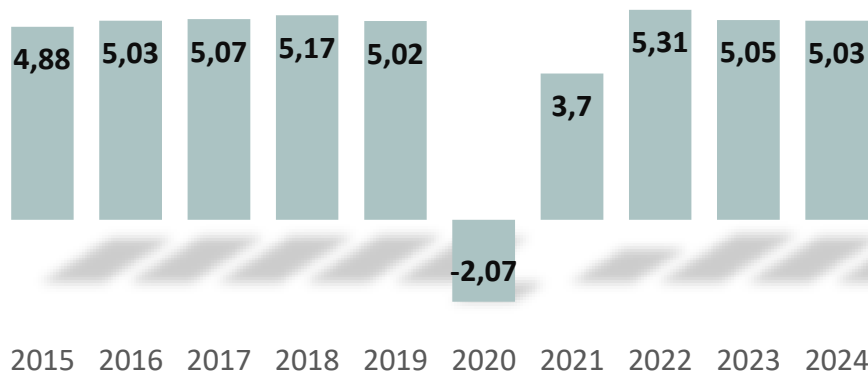


Sumber (Source): Bloomberg

5. Di tengah hal tersebut, perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan *resilient* dan tetap tumbuh baik. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 tercatat 5,03% dengan indikator kinerja sektor jasa keuangan yang positif, didukung oleh fondasi permodalan yang solid, likuiditas yang mencukupi, dan profil risiko yang terkelola dengan baik.

5. Amid such challenges, Indonesia's economy and financial services sector remain resilient and continue to grow positively. In 2024, economic growth was recorded at 5.03% with positive financial services performance indicators, supported by a solid capital structure, adequate liquidity, and a well-maintained risk profile.

Grafik 4. PDB Indonesia
Graph 4. GDP Indonesia

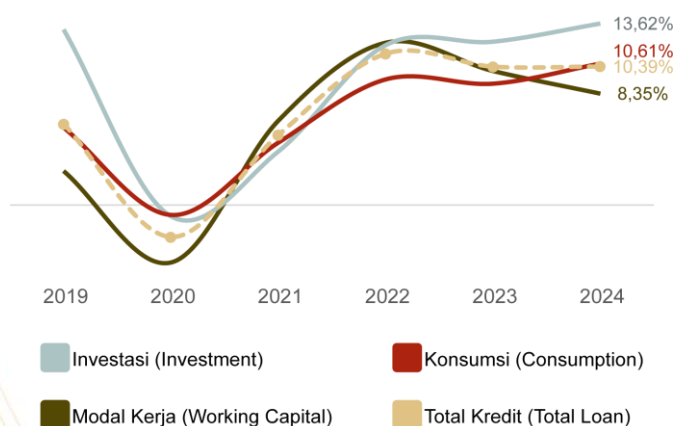


Sumber (Source): BPS

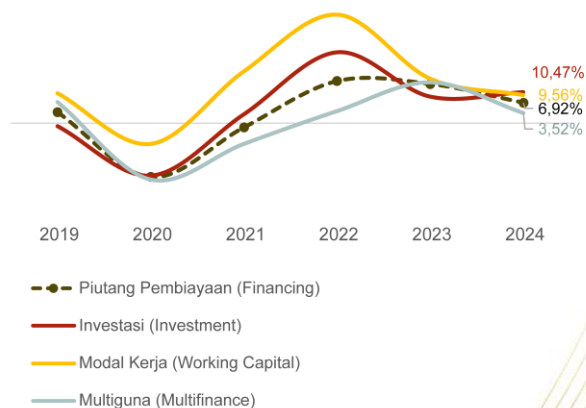
6. Dari aspek intermediasi, perbankan telah menyalurkan kredit/pembiayaan sebesar Rp7.827 triliun, tumbuh *double digit* sesuai target sebesar 10,39% yoy dan risiko kredit yang terjaga. Sementara itu, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan masih tumbuh sebesar 6,92% yoy menjadi Rp503,43 triliun.

6. On the intermediation front, the banking sector recorded loans/financing totaling IDR7,827 trillion, achieving double-digit growth at 10.39%, which aligns with set target while maintaining manageable credit risk. Meanwhile, financing companies receivables still grew by 6.92% yoy to IDR503.43 trillion.

Grafik 5. Pertumbuhan Kredit Perbankan
Graph 5. Banks' Loan Growth



Grafik 6. Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan
Graph 6. Financing Companies' Receivables

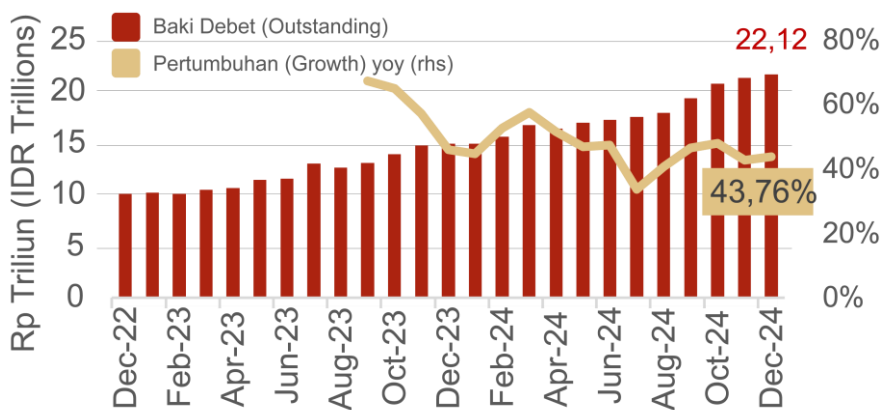


Sumber (Source): OJK

7. Di sisi lain, intermediasi non konvensional seperti *outstanding* pembiayaan pinjaman daring/*fintech peer to peer (P2P) lending* tercatat sebesar Rp77,02 triliun, tumbuh 29,14%, pembiayaan produk *Buy-Now Pay-Later (BNPL)* yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing tercatat Rp22,12 triliun dan Rp6,82 triliun atau tumbuh masing-masing 43,76% dan 37,6%, serta industri pergadaian tercatat sebesar Rp88,05 triliun, tumbuh 26,9%.

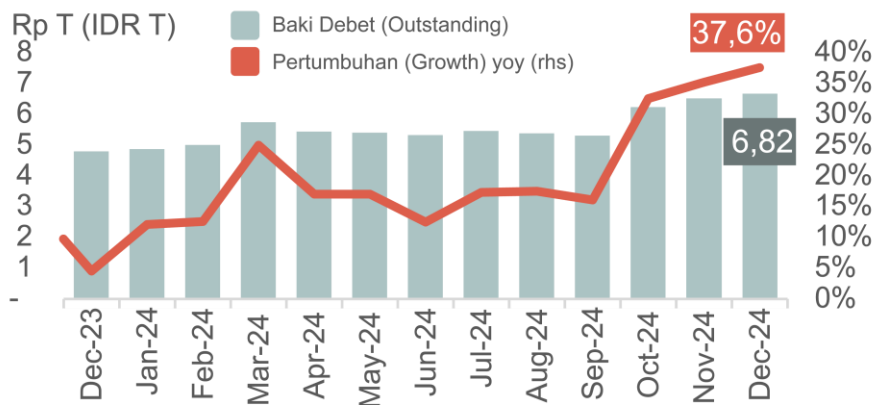
7. Meanwhile, the non-conventional intermediation, such as outstanding online loan financing/*fintech peer-to-peer (P2P) lending*, recorded at IDR77.02 trillion, growing by 29.14%. The Buy-Now Pay-Later (BNPL) financing products provided by banks and finance companies recorded at IDR22.12 trillion and IDR6.82 trillion, or growing by 43.76% and 37.6%, respectively, and the pawn services industry recorded IDR88.05 trillion in total financing, growing by 26.9%.

Grafik 7. Buy Now Pay Later Perbankan
Graph 7. Buy Now Pay Later of Banks



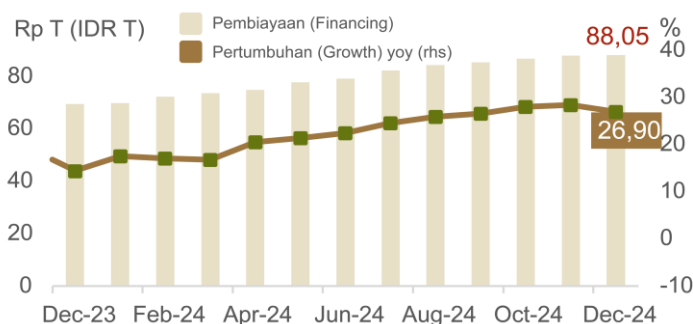
Sumber (Source): OJK

Grafik 8. Buy Now Pay Later Perusahaan Pembiayaan
Graph 8. BNPL of Financing Companies



Sumber (Source): OJK

Grafik 9. Pembiayaan Pergadaian
Graph 9. Pawnshops Financing



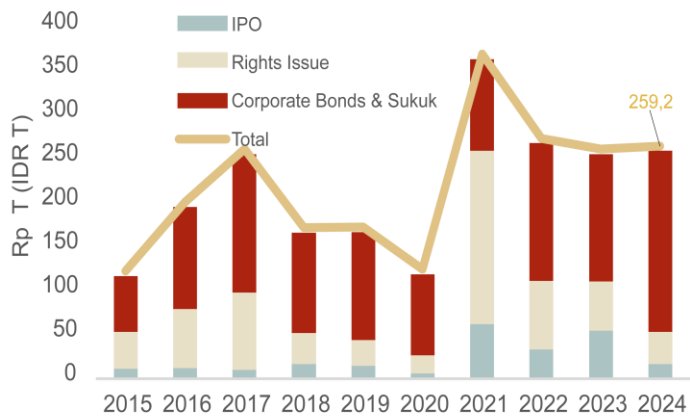
Sumber (Source): OJK

8. Penghimpunan dana di pasar modal berhasil melampaui target di atas Rp200 triliun, mencapai Rp259,24 triliun dari 199 penawaran umum yang secara nominal didominasi oleh penawaran umum sektor keuangan sebesar 36%. Di sisi *demand*, jumlah investor pasar modal telah tumbuh 6 kali lipat dalam 5 tahun terakhir menjadi 14,87 juta investor per akhir Desember 2024.

8. Capital market fundraising has successfully exceeded the target of IDR200 trillion, reaching IDR259.24 trillion from 199 public offerings, with the financial sector dominating 36%. On the demand side, the number of capital market investors has grown sixfold over the past five years to 14.87 million at the end of December 2024.

Grafik 10. Penghimpunan Dana Pasar Modal
Graph 10. Fundraising at Capital Market

Grafik 11. Jumlah Investor Pasar Modal
Graph 11. Total Capital Market Investors



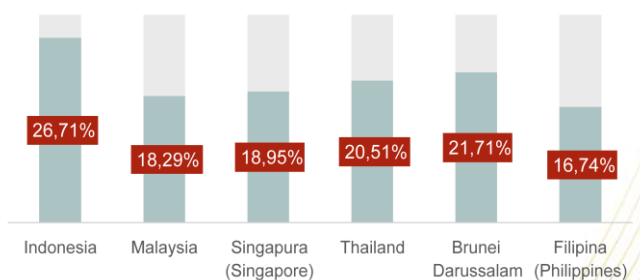
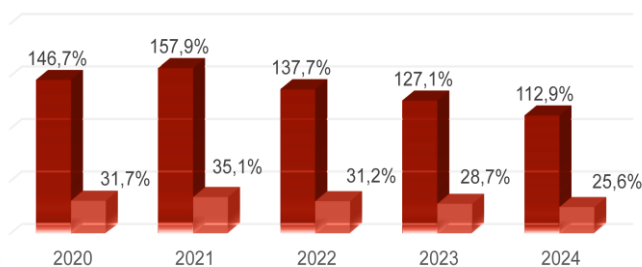
Sumber (Source): OJK

9. Indikator likuiditas berada di atas threshold dengan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau solid. Bahkan sektor perbankan mencatat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di level 26,69%, tertinggi di antara negara-negara kawasan. Kondisi ini merupakan modalitas bagi sektor jasa keuangan agar tetap berdaya tahan dalam menghadapi kerentanan dan guncangan eksternal.

9. The liquidity indicators were well above the thresholds, followed by solid financial services industry's solvability. Indeed, the banking sector recorded a Capital Adequacy Ratio (CAR) of 26.69%, the highest among countries in the region. This condition allows the financial services sector to remain resilient in the face of external vulnerabilities and shocks.

Grafik 12. Likuiditas Perbankan
Graph 12. Banking Liquidity

Grafik 13. CAR Kawasan
Graph 13. CAR in the Regional

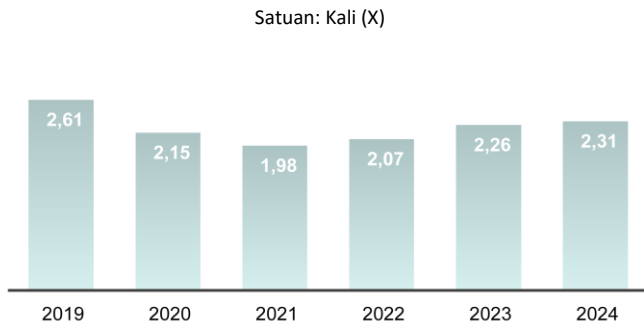


■ AL/NCD (Liquid Assets/Non Core Deposit)
■ AL/DPK (Liquid Assets/Third-Party Funds)

Sumber (Source): OJK, CEIC | Indonesia: Des-24, Negara Kawasan: Sept-24

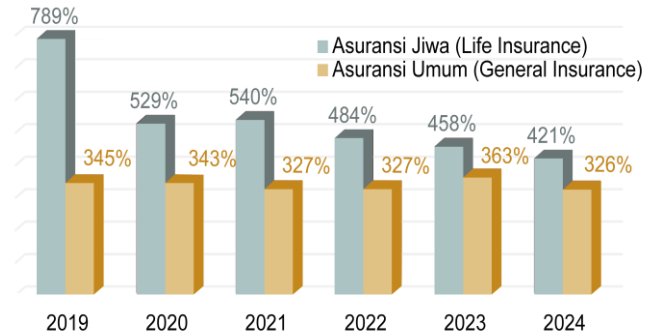
Sumber (Source): OJK

Grafik 14. Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan
Graph 14. Financing Companies' Gearing Ratio



Sumber (Source): OJK

Grafik 15. RBC Asuransi
Graph 15. Insurance Companies' RBC



10. Dukungan sinergi yang baik dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS, sebagai lembaga otoritas keuangan dalam KSSK, serta industri jasa keuangan secara keseluruhan, telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tersebut.

10. The solid synergy with Ministries, Government, and Non-Governmental Institutions, especially the Ministry of Finance, Bank Indonesia, and LPS, as financial sector authorities within the Financial System Stability Committee (KSSK), and the financial services industry has played a significant role in the achievements we witness today.

C. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS OJK 2025

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

11. Tantangan dan ketidakpastian yang akan dihadapi di 2025 diperkirakan tidak akan lebih mudah. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan meningkat secara terbatas. Normalisasi kebijakan suku bunga AS dan beberapa negara utama lainnya diperkirakan akan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat.

C. OJK POLICY PRIORITIES 2025

Notable Ladies and Gentlemen,

11. The challenges and uncertainties in 2025 are unlikely to get any easier. The global economy is projected to grow with certain limitations. The normalization of interest rate policies in the US and several other major countries is expected to continue, although at a slower pace.

Tabel 2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Table 2. Economic Growth Projection

PDB (GDP) % yoy	IMF WEO Jan -25			PDB (GDP) % yoy	WB GEP Jan -25			Dec-24		
	2024e	2025F	2026F		2024e	2025F	2026F	2024e	2025F	
Global	3.2	3.3	3.3	Global	2.7	2.7	2.7	Global	3.2	3.3
US	2.8	2.7	2.1	US	2.8	2.3	2.0	AS	2.8	2.4
Euro Area	0.8	1.0	1.4	Euro Area	0.7	1.0	1.2	Euro Area	0.8	1.3
Japan	-0.2	1.1	0.8	Japan	0.0	1.2	0.9	Jepang	-0.3	1.5
UK	0.9	1.6	1.5	Brazil	3.2	2.2	2.3	Inggris	0.9	1.7
Germany	0.2	0.3	1.1	China	4.9	4.6	4.1	Jerman	0.0	0.7
China	4.8	4.6	4.5	India	6.5	6.7	6.7	Tiongkok	4.9	4.7
Indonesia	5.0	5.1	5.1	Indonesia	5.0	5.1	5.1	Indonesia	5.1	5.2
India	6.5	6.5	6.5					India	6.8	6.9
Brazil	3.7	2.2	2.2					Brazil	3.2	2.3

Sumber (Source): IMF, World Bank

12. Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri, berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan *monetary path* dari berbagai otoritas moneter global yang akan memengaruhi *capital flow* dan nilai aset keuangan.
13. Kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan akan meningkat seiring dengan perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. *Trade policy* yang lebih ditentukan oleh aspek politik dibandingkan dengan aspek ekonomi, berpotensi meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan menurunkan volume perdagangan. Begitupun dengan mulai terjadinya divergensi kebijakan dan penerapan standar internasional di sektor keuangan antar negara, yang juga dapat menciptakan perbedaan daya saing sektor keuangan.
14. Di sisi domestik, kita dihadapkan pada isu struktural seperti perlunya meningkatkan kembali penyerapan tenaga kerja sektor formal serta mempercepat pemulihan daya beli masyarakat khususnya untuk kelompok menengah bawah yang pemulihannya masih tertahan.
15. Di tengah *downside risks* tersebut, diperlukan langkah transformatif untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. Oleh karena itu, kami menyambut berbagai Program Prioritas yang diinisiasi Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke *level* yang lebih tinggi menuju visi Indonesia Emas.
12. Meanwhile, economic recovery divergence among industrial countries may lead to differing monetary paths among global monetary authorities, which could influence capital flows and the value of financial assets.
13. The complexity of economic recovery is anticipated to heighten amidst dynamic geopolitical and geoeconomic developments. Trade policies, increasingly driven by political rather than economic considerations, pose a risk of further fragmentation of global trade and declining trade volumes. Likewise, the policy divergence and the implementation of international standards in the financial sector amongst countries may create competitiveness disparities in the financial sector.
14. On the domestic side, we are faced with structural issues such as the need to increase the absorption of formal sector labour and accelerate the recovery of household purchasing power, particularly among lower and middle-income groups whose recovery remains constrained.
15. Transformative measures are essential to achieving the targeted growth levels amid such downside risks. With that, we are pleased to support the Government's various Priority Programs in fostering higher growth, which aligns with the Golden Indonesia vision.



16. Untuk itu, kami mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah Pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan. Kebijakan prioritas **pertama** dilakukan melalui **optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas Pemerintah**.

17. Kami mengarahkan sektor jasa keuangan mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan mengingat keterbatasan kapasitas anggaran Pemerintah.

18. Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan, diberikan melalui kemudahan akses pembiayaan dengan skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus kepada petani dan UMKM, serta pengembangan produk asuransi parametrik.

16. Therefore, we undertake a series of policy priorities aligned with the Government's agenda to accelerate growth. Our **first** priority policy relates to **optimizing the financial services sector's role in support of the Government's national priority programs**.

17. Considering the Government's fiscal limitations, we have directed the financial services industry to play a pivotal role in driving growth.

18. Support for the Free Nutritious Meals Program (MBG) and food security is bolstered through enhanced access to financing with special credit schemes, guarantees for farmers and MSMEs, as well as the development of parametric insurance products.



19. Kolaborasi antara Kantor OJK di daerah dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di daerah juga akan ditingkatkan untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok bagi program MBG.

20. Peran serta mewujudkan masyarakat yang sehat kami lakukan antara lain melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan.

21. Kami juga terus meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat, termasuk melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan, dan mewajibkan Industri Jasa Keuangan untuk aktif mengedukasi masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa. Kami meyakini, program-program tersebut dapat menjadi ikhtiar kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045 dengan membentuk SDM yang unggul dan sehat.

19. Collaboration between OJK regional offices, local governments and stakeholders in the area will be strengthened to develop financing ecosystems for key regional commodities, supporting food security and MBG supply chains.

20. Our contributive efforts to a healthier society are exemplified by our collaboration with the Ministry of Health to improve the national health insurance ecosystem.

21. We also continue to improve public financial literacy, including by integrating financial education into school curriculum and requiring the financial services industry to actively educate the public, including students. We firmly believe that these initiatives will contribute to shaping a high-quality and healthy workforce, supporting Indonesia's aspiration to become a developed nation by 2045.



Bapak/Ibu hadirin sekalian yang kami banggakan,

22. Pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sangat diharapkan terwujud dan menciptakan multiplier effect yang besar, yang akan mendorong investasi mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional.
23. Untuk itu, kami mengambil langkah kebijakan yang holistik, dengan mempermudah dan memperluas akses kredit/pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah/MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta penerapan bobot risiko rendah dan granular. Kami juga telah menegaskan berdasarkan bukti konkret pelaksanaan selama ini, bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non-lancar.
24. Dalam rangka mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), OJK menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta para pemangku kepentingan di sektor lainnya.
25. Dalam mendorong pembiayaan pembangunan perumahan, OJK memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan/pengolahan tanah.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

22. The development of three million housing units for Low-Income Communities (MBR) is highly anticipated to materialize and create a significant multiplier effect, driving investments to achieve national economic growth targets.
23. To support this, we are implementing a holistic policy approach by simplifying and expanding access to housing ownership credit/financing (KPR) for MBR. This includes assessing asset quality based on a single pillar, applying low and granular risk weights for KPR. Based on the evidence of the implementation, we have clarified that there is no prohibition on providing loans to non-performing debtors.
24. In order to accelerate the resolution of complaints related to the KPR process for MBR, particularly concerning Financial Information Services System (SLIK), OJK has established a dedicated complaints channel and formed a task force in collaboration with the Ministry of Housing and Settlement and relevant stakeholders in other sectors.
25. In regard to encouraging the financing of housing development, OJK provides flexibility for housing developers to obtain funding for land acquisition or development.

Dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur, khususnya Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP). Selain itu, asuransi dan penjaminan juga akan diperkuat untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan, antara lain melalui penjaminan Kredit Modal Kerja dan asuransi properti serta asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Housing liquidity financing support will be facilitated through fine-tuning structured investment product schemes, particularly Asset-Backed Securities – Participation Letter (EBA-SP). Additionally, insurance and guarantees will be strengthened to support MSME developers in mitigating housing development risks, including guarantees for Working Capital Loans, as well as property insurance, and credit life insurance for MBR KPR customers.

26. Selanjutnya, untuk memperkuat ketahanan dan likuiditas perekonomian nasional melalui mekanisme pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia, kami dukung dengan memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar untuk ketersediaan pembiayaan bagi sektor ekspor, melalui pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk penempatan DHE di bank, yang digunakan sebagai agunan kredit *back-to-back* sehingga Lembaga Jasa Keuangan dapat memberikan margin yang wajar.
27. Kami juga mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan kapasitas dalam melihat peluang pembiayaan program prioritas lainnya, seperti program hilirisasi.

26. Furthermore, we support greater flexibility in export sector financing to enhance national economic resilience and liquidity through the placement of Export Proceeds from Natural Resources (DHE SDA) into Indonesia’s financial system. This includes exemptions from the Legal Lending Limit (BMPK) for DHE deposits used as collateral for back-to-back loans while ensuring that financial institutions provide reasonable margins.
27. We also encourage financial service institutions to strengthen their ability to identify financing opportunities for other priority programs, such as the downstreaming program.

Penempatan DHE di bank yang digunakan sebagai agunan kredit *back-to-back*, maka kredit tersebut akan dikecualikan dari BMPK

Penempatan dana nasabah eksportir ke *time deposit* OPT Valas BI tidak berdampak pada perlakuan prudensial (LCR • NSFR • KPMI • BMPK • Kualitas Aset)

Proses analisis kredit *back-to-back* yang lebih sederhana

Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke sistem keuangan Indonesia untuk memperkuat ketahanan dan likuiditas perekonomian nasional

OJK memberikan ruang fleksibilitas untuk pembiayaan bagi sektor ekspor impor

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Distinguished Ladies and Gentlemen,

28. Untuk mendukung program prioritas nasional mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, penguatan sektor keuangan sangat diperlukan. Kami mencanangkan kebijakan prioritas yang **kedua**, yaitu **pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan**.

28. Strengthening the financial sector is highly essential to support national priority programs and achieve higher economic growth. Therefore, we have established a **second** priority policy, **developing the financial services sector for inclusive and sustainable development**.



29. Awal tahun 2025 menandai telah terlaksananya amanat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan mandat yang semakin luas bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto (AKD-AK), instrumen derivatif keuangan dengan *underlying* efek, kegiatan usaha bulion, koperasi di sektor jasa keuangan *open-loop*, serta Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK). Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya transisi mandat dimaksud dengan tepat waktu sesuai amanat UU P2SK.

30. Semakin luasnya lanskap sektor jasa keuangan dan instrumen keuangan yang semakin variatif akan mendukung pendalaman pasar, sehingga sektor jasa keuangan dapat semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan atas industri baru tersebut akan kami selaraskan agar sejalan dengan arah pengembangan sektor jasa keuangan secara keseluruhan.

31. Kami juga akan melakukan penyempurnaan infrastruktur perizinan dan pengawasan, termasuk menetapkan kelembagaan dan kepengurusan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dalam rangka penataan Konglomerasi Keuangan, mengingat besarnya *size* dan signifikansinya terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Langkah itu akan menjadikan OJK setara dengan otoritas keuangan lainnya di dunia.

29. Early 2025 marks the implementation of the Financial Sector Omnibus Law (UU P2SK), which expands OJK's mandate to regulate and supervise digital financial assets, including crypto assets (AKD-AK), financial derivative instruments with securities as underlying assets, bullion business activities, financial services sector cooperatives, and Financial Conglomerate Holding Companies (PIKK). We extend our gratitude to all parties who have supported the timely transition of this mandate in accordance with the provisions of Financial Services Omnibus Law (UU P2SK).

30. As the financial services sector landscape expands, financial instruments that enhance market deepening will enable the sector to contribute more significantly to national economic growth. The development of these new industries will be aligned with the overall direction of financial sector development.

31. We will also enhance licensing and supervisory infrastructure, including establishing the institutional framework and governance for Financial Conglomerate Holding Companies (PIKK) in order to strengthen financial conglomeration structuring, given its significant size and impact on financial services sector stability. Thus, OJK is on par with other global financial authorities.

32. Dalam meningkatkan akses pembiayaan, kami akan mengembangkan arsitektur *Credit Reporting System* (CRS) yang lebih luas dengan berbasis SLIK, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Peningkat Kredit Alternatif (PKA) yang ada saat ini, sehingga dapat lebih memudahkan bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan pembiayaan, termasuk mempermudah akses informasi perkreditan melalui *iDebku mobile*.
33. Diversifikasi dan pengembangan instrumen di pasar modal juga akan terus dilakukan dalam mendorong pendalaman pasar keuangan, antara lain melalui penerbitan produk *Exchange-Traded Fund* (ETF) dengan *underlying* emas.
34. Peran industri keuangan syariah juga ditingkatkan melalui sinergi dengan industri halal dan penerbitan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, program-program peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus digencarkan untuk memperluas basis investor dan konsumen.

32. To improve financing access, we will develop a more comprehensive credit reporting system (CRS) based on the existing SLIK, Credit Management Information Agencies (LPIP), and Alternative Credit Scoring (PKA), enabling financial institutions to provide better financing access, including simplifying credit information access through the *iDebku mobile* platform.
33. Market deepening efforts will continue through the diversification and development of capital market instruments, including the issuance of Exchange-Traded Funds (ETFs) with gold as the underlying asset.
34. The role of the Islamic finance industry will be further enhanced through synergies with the halal industry and the issuance of products tailored to market needs. Additionally, financial literacy and inclusion programs will be intensified to expand the investor and consumer base.



35. OJK konsisten mendukung pencapaian komitmen *net zero emission* Indonesia dengan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam inisiatif keuangan berkelanjutan melalui penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2. Taksonomi ini menyelaraskan klasifikasi sektor TKBI dengan sektor NDC yang telah ditetapkan Pemerintah dan program prioritas Pemerintah, antara lain dengan memasukkan sektor konstruksi dan *real estate*, termasuk konstruksi gedung dan kawasan permukiman bagi MBR, transportasi dan pergudangan, serta sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, yang dapat dikategorikan mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan. Perluasan insentif baru juga akan diberikan untuk penerbitan instrumen keuangan yang berlandaskan keberlanjutan (*green bond*).

35. OJK is consistently committed to supporting net-zero emission targets by enhancing the role of the financial services sector in sustainable finance initiatives. This includes the issuance of the Indonesia Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) version two. This taxonomy aligns the classifications of the TKBI sector with the Government's Nationally Determined Contributions (NDC) and priority programs, It incorporates the construction and real estate sector (including the construction of buildings and residential areas for low-income communities, transportation, and warehousing), as well as the forestry and palm oil plantation sectors, which are categorized as supporting the green and sustainable economy. New incentives will also be provided for the issuance of sustainability-based financial instruments, such as green bond.



36. OJK terus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga untuk melengkapi ekosistem bursa karbon dalam mendorong bursa karbon Indonesia dengan dibukanya akses perdagangan karbon luar negeri, serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai *leading country* di kawasan yang memberikan hasil nyata dalam mitigasi perubahan iklim.

36. OJK continues collaborating with Ministries and Agencies to strengthen the carbon exchange ecosystem. It aims to position Indonesia's carbon market as the leading platform in the region. This includes opening international carbon trading access and strengthening Indonesia's position as a regional leader in effective climate change mitigation.

Tabel 3. Bursa Karbon
Table 3. Carbon Exchange

Nilai Perdagangan (Trade Value) - (Rp Miliar)	62,93
Volume Perdagangan (Trade Volume) - (Ton CO2)	1.181.255
Penjual (Buyer)	4
Pembeli (Sell)	49
Jumlah Pengguna Jasa (Trader)	107

Sumber (Source): OJK 31 Januari 2025

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

37. Sektor jasa keuangan yang kuat menjadi fondasi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, prioritas kebijakan **ketiga** kami adalah **penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan.**

38. Penguatan dilakukan dari aspek kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan SJK melalui konsolidasi industri termasuk peningkatan permodalan dan stratifikasi kegiatan usaha untuk Manajer Investasi (MI) dan Perusahaan Efek (PE), peningkatan tata kelola dan manajemen risiko serta transparansi. OJK juga terus melakukan langkah penegakan ketentuan terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang belum memenuhi ekuitas minimum.

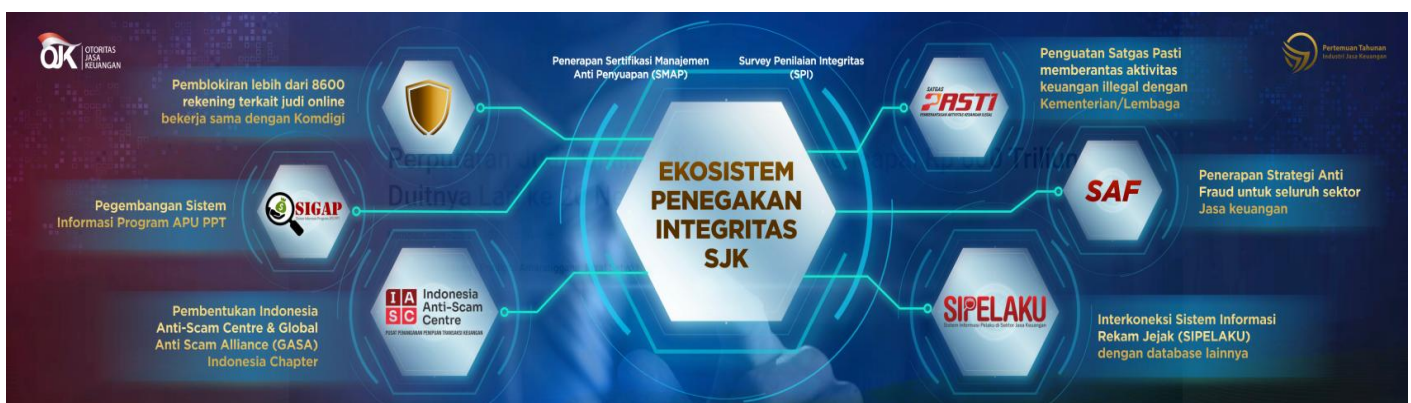
Distinguished Ladies and Gentlemen,

37. The strong financial services sector serves as the foundation for national economic growth. Therefore, our **third** policy priority is **strengthening the capacity of the financial services sector and enhancing supervisory practices.**

38. The strengthening efforts are carried out from the institutional capacity perspective to enhance the competitiveness and resilience of the financial services sector through industry consolidation, including capital strengthening and business activity stratification for Investment Managers (IM) and Securities Companies (SC), governance, risk management, and transparency improvement. Additionally, OJK continues to enforce compliance measures against financial institutions that have not meet the minimum equity requirements.

39. Untuk meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berintegritas, serta meningkatkan perlindungan konsumen, OJK akan terus menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan pindar/*fintech peer-to-peer* (P2P) *lending* dan produk *Buy Now Pay Later* (BNPL).
40. Profesi yang terlibat di sektor jasa keuangan merupakan salah satu elemen penting untuk menjamin kualitas dan integritas sektor jasa keuangan. Dalam kaitan itu, OJK melakukan penataan terhadap Profesi di sektor jasa keuangan yang mencakup proses pendaftaran, sinergi dengan otoritas pembina dan pengawas, serta peningkatan kompetensi melalui standardisasi dan sertifikasi.
41. Mempertimbangkan perkembangan kompleksitas sektor jasa keuangan, maka penguatan pengawasan utamanya integrasi *supervisory technology* (*suptech*) dalam proses pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* (AI), menjadi hal yang tidak terelakkan.
42. Melalui transformasi pengawasan berbasis teknologi informasi serta memperkaya *tools* pengawasan, diharapkan akan dapat meningkatkan *output* pengawasan yang lebih komprehensif, lebih cepat dan juga efisiensi sumber daya.

39. OJK will continuously refine regulations concerning fintech peer-to-peer (P2P) lending operations and Buy Now Pay Later (BNPL) financing products provided by financing companies to enhance financing quality, create a healthy industry ecosystem, and improve consumer protection.
40. Professions in the financial services sector are also crucial in ensuring the quality and integrity of the industry. In this regard, OJK is structuring financial sector professions by refining registration processes, fostering synergy with regulatory and supervisory authorities, and enhancing professional competencies through standardization and certification.
41. Given the increasing complexity of the financial services sector, integrating supervisory technology (*suptech*) into the supervisory process by utilizing technologies such as Big Data Analytics and Artificial Intelligence (AI), has become inevitable.
42. Through the technology-driven supervisory transformation and enhancement of supervisory tools, we aim to elevate supervisory outputs, making them more comprehensive, faster, and resource-efficient.



Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

43. Kebijakan-kebijakan dimaksud akan memberikan hasil optimal dengan kuatnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kami **meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan perlindungan konsumen**, yang menjadi prioritas kebijakan keempat.
44. Pengenaan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan terus dilakukan secara konsisten dan terefleksi dari jumlah sanksi yang dikenakan pada tahun 2024.

Distinguished Ladies and Gentlemen,

43. These policies will yield optimal results when public and investor confidence in the financial services sector remains strong. Therefore, we are enhancing the **effectiveness of integrity enforcement and consumer protection**, which is our **fourth** policy priority.
44. The imposition of sanctions on entities violating regulations continues to be carried out consistently, as reflected in the number of sanctions imposed in 2024.

Tabel 4. Pengenaan Sanksi
Table 4. Sanctions Imposed

Sektor (Sector)	Total sanksi administratif (Total administrative sanctions)		Pencabutan izin/pembatalan pendaftaran (License Revocation/ Cancellation of Registration)		Pembekuan izin usaha (License Suspension)		Sanksi administratif berupa Denda (Administrative Sanction in the form of Fine)				Peringatan tertulis		Perintah tertulis	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023		2024		2023	2024	2023	2024
							Jml	Rp M	Jml	Rp M				
PMDK	822	1,011	15	3	1	1	702	107	841	146	31	145	73	21
PPDP	1,326	1,325	3	-	1	7	350	4	410	2	970	908	2	-
PVML	1,635	1,873	4	10	22	27	399	2	564	3	1,210	1,272	-	-
IAKD*	94	10	17	-	-	-	-	-	-	-	77	10	-	-
PEPK	505	834	-	-	-	-	191	30	460	18	314	374	-	-
Total	4,382	5,053	39	13	24	35	1,642	143	2,275	169	2,602	2,709	75	21

*) 2023 dan Semester I 2024 sanksi terhadap peserta sandbox; Semester II 2024 fokus pada pendaftaran dan pengawasan profiling industri

45. OJK bersama aparat penegak hukum serta instansi/lembaga berwenang lainnya secara aktif terus berkolaborasi dalam rangka mencegah lembaga jasa keuangan dijadikan sarana untuk melakukan tindak kejahatan, termasuk terkait judi *online*.
46. Peran Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang merupakan koordinasi berbagai Kementerian/Lembaga/Institusi untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal terus ditingkatkan diiringi dengan intensifikasi kegiatan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

45. OJK, in collaboration with law enforcement agencies and other relevant institutions, is actively working to prevent financial institutions from being misused for illicit activities, including online gambling
46. The role of the Task Force for the Eradication of Illegal Financial Activities (Satgas PASTI), which coordinates across Ministries/Agencies/Institutions to combat illegal financial activities, continues to be strengthened alongside preventive measures through public education and dissemination.

47. Penanganan penipuan (*scam*) yang terjadi di sektor keuangan juga kami inisiasi melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC), sehingga korban *scam* memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pengembalian dana dengan langkah penanganan yang lebih cepat melalui IASC. Ke depan, penanganan *scam* juga akan diperkuat dengan rencana pembentukan *Global Anti-Scam Alliance - Indonesia Chapter*.

47. Fraud (*scam*) handling in the financial sector is initiated through the Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), providing scam victims with a greater opportunity to recover their funds through faster resolution processes via IASC. Going forward, scam prevention efforts will be further strengthened with the planned establishment of the *Global Anti-Scam Alliance (GASA) - Indonesia Chapter*.

Tabel 5. Statistik Satgas PASTI
Table 5. Satgas PASTI Statistics

Entitas (Entity)	Tahun (Year)								Total
	2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1 s.d 24 Jan-25	
Investasi Ilegal (Illegal Investment)	185	442	347	98	106	40	310	209	1,737
Pinjol Ilegal (Illegal fintech peer to peer lending)	404	1,493	1,026	811	698	2,248	2,930	587	10,197
Gadai Ilegal (Illegal Pawning)	-	68	75	17	91	-	-	-	251
Total	589	2,003	1,448	926	895	2,288	3,240	796	12,185

Sumber (Source): OJK

48. Untuk melengkapi ekosistem penegakan integritas di sektor jasa keuangan dan semakin mempersempit ruang gerak pelaku *fraud* di sektor jasa keuangan, OJK membentuk *database fraudster* terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU). SIPELAKU menjadi sarana diseminasi pelaku *financial fraud* kepada Lembaga Jasa Keuangan sehingga diharapkan dapat menjadi bagian dari manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam berhubungan dengan *stakeholder*. Ke depan, interkoneksi SIPELAKU akan terus dikembangkan dengan sumber data lain.

48. To further enhance integrity enforcement within the financial services sector and narrow the space for fraudulent actors, OJK has developed an integrated fraud database named the Financial Services Sector Perpetrator Information System (SIPELAKU). SIPELAKU serves as a financial fraud perpetrator information-sharing platform for financial institutions, forming part of their risk management framework in engaging with stakeholders. Going forward, SIPELAKU will be increasingly interconnected with other data sources.

49. Selanjutnya, untuk memperkuat perlindungan konsumen, investor dan masyarakat serta penerapan prinsip akuntabilitas, OJK akan mengatur mekanisme dan tata cara pemasaran produk keuangan yang lebih transparan, terutama terkait iklan, deskripsi dan ringkasan produk/layanan. Praktik pemasaran akan ditata untuk meminimalisasi potensi kerugian konsumen.

49. Additionally, to strengthen consumer, investor, and public protection while ensuring accountability, OJK will regulate mechanisms and procedures for financial product marketing to ensure greater transparency, particularly in advertisements, product descriptions, and service summaries. Marketing practices will be structured to minimize potential consumer losses.

D. OUTLOOK SEKTOR JASA KEUANGAN 2025

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

50. Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil, kami optimis tren positif kinerja sektor keuangan di tahun 2025 akan berlanjut. **Kredit perbankan** diproyeksikan tumbuh sebesar **9%-11%**, didukung pertumbuhan **Dana Pihak Ketiga** sebesar **6%-8%**. Di pasar modal, **penghimpunan dana** ditargetkan sebesar **Rp220 triliun**.

D. OUTLOOK FINANCIAL SERVICES SECTOR 2025

Distinguished Guests,

50. Considering the various challenges and opportunities ahead, as well as the policies to be implemented, we are optimistic that the positive performance of the financial sector will continue in 2025. In the banking sector, **credit** is projected to grow by **9%-11%**, supported by a **6%-8%** growth in **Third Party Funds**. In the capital market, **fund raising** is targeted at **IDR220 trillion**.



51. **Piutang pembiayaan** Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh **8%-10%**. **Aset Asuransi** diperkirakan tumbuh sebesar **6%-8%**. **Aset Dana Pensiun** diperkirakan tumbuh **9%-11%** dan **Aset Penjaminan** diperkirakan tumbuh **6%-8%**.

52. Kami akan melakukan *review outlook* ini secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan *outlook* pertumbuhan ekonomi nasional.

53. Untuk dapat menjaga kinerja sektor jasa keuangan serta target pertumbuhan ekonomi nasional, sinergi kebijakan perlu semakin diperkuat terutama untuk mendukung perbaikan iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penyelesaian berbagai aturan turunan UU P2SK baik terkait menjaga stabilitas sistem keuangan maupun program pendalaman pasar.

51. **Financing receivables** from Financing Companies are projected to grow by **8%-10%**. **Insurance Assets** are expected to grow by **6%-8%**. **Pension Fund assets** are estimated to increase by **9%-11%**, and **Credit Guarantee assets** are projected to grow by **6%-8%**.

52. OJK will conduct periodic outlook reviews to align with the national economic growth developments.

53. To sustain financial sector performance and support national economic growth targets, policy synergies must continue to be strengthened, particularly to foster a conducive investment climate and finalize various implementing regulations under Financial Sector Omnibus Law (UU P2SK), both in maintaining financial system stability and advancing market deepening programs.

E. PENUTUP

Hadirin sekalian,

54. Demikian arah kebijakan OJK di tahun 2025 ini kami sampaikan.
55. Selanjutnya, kami akan meluncurkan **Indonesia Anti-Scam Center (IASC)** dan **Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU)**, sebagai persembahan OJK untuk peningkatan integritas sektor jasa keuangan Indonesia.
56. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.***

Om shanti shanti shanti om

Jakarta, 11 Februari 2025

Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisiner OJK

E. CLOSING

Esteemed guests,

54. This concludes our presentation on OJK's policy directions for 2025.
55. On this occasion, we are pleased to launch the Indonesia Anti-Scam Center (IASC) and the Financial Services Sector Actor Information System (SIPELAKU) as OJK's contribution to enhance the integrity of Indonesia financial services sector.
56. May God the Almighty bless us and grant His blessings upon all of us.

Thank you.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.***

Om shanti shanti shanti om

Jakarta, 11 February 2025

Mahendra Siregar

Chairman of the Board of Commissioners, OJK

